



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/02/2024
 Reviewed : 26/02/2024
 Accepted : 03/03/2024
 Published : 07/03/2024

Samahati Zega¹
 Armstrong Harefa²
 Syukur Kasieli Hulu³
 Adrianus
 Bawamenewi⁴
 Jesslyn Elisandra
 Harefa⁵

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Implementasi pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli , (2) meneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan karakter, dan (3) mengetahui upaya dari hambatan pelaksanaan pendidikan karakter. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: (1) pelaksanaan pendidikan karakter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan. pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, (2) faktor pendukungnya adalah warga binaan taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; kebijakan wajib diikuti warga binaan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi sebagian warga binaan; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran sempit, dan (3) solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan pemberian sanksi terhadap warga binaan ketika ada yang melanggar peraturan dan dimasukan ke selker; memotivasi warga binaan; mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Warga Binaan.

Abstract

The objectives of this research are: (1) to determine the implementation of character education for inmates at the Class II B Correctional Institution in Gunungsitoli City, (2) to examine the supporting and inhibiting factors for the implementation of character education, and (3) to determine the obstacles to implementing character education. This research approach is descriptive qualitative. The research subjects were inmates and correctional officers. Data was collected by observation, interviews and study of documents and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research are: (1) the implementation of character education at the Class II B Correctional Institution in Gunungsitoli City is running according to correctional objectives. character education is carried out through physical, spiritual, intellectual and independent activities, (2) the supporting factors are that the inmates are obedient and orderly; cooperation with third parties; the policy must be followed by the inmates. The inhibiting factor is the lack of motivation on the part of the inmates; limited infrastructure and budget; narrow marketing, and (3) the solution to the obstacles is to provide proposals for leave and imposing sanctions on inmates if they violate the rules and are placed in the detention selker; motivate inmates; submit a proposal to the Regional Office of Law and Human Rights.

Keywords: Character Education, Assisted Citizens.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias

email: samahatizegappkn@gmail.com¹, amstrongharefa1970@gmail.com²,

adrianusbawamenewi@gmail.com³, adrianusbawamenewi@gmail.com⁴, jesslynharefa19@gmail.com⁵

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Abdullah Munir (2010:XII) menyebutkan bahwa “karakter adalah pisau bermata dua. Setiap karakter memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang”. Anak yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah munculnya sifat sembrono dan kurang perhitungan karena terlalu yakin dengan kemampuan atau kalkulasinya.

Saat ini, pendidikan karakter sedang digencar-gencarkan di Indonesia. Pendidikan karakter dinilai mampu menumbuhkan dan memperbaiki mental bangsa Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Raharjo dalam Zubaedi (2011:16) yang menyebutkan bahwa: Pendidikan karakter suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendidikan karakter melalui pembinaan sejatinya merupakan pembinaan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. “Pembinaan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa” (Zubaedi, 2011:17).

Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada seseorang. Bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku adalah cerminan bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai serta moral. Namun demikian, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi luntur akibat pengaruh lingkungan, pergaulan maupun media massa.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar narapidana dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pembinaan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pembinaan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Pembinaan karakter sejatinya merupakan pendidikan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang bisa memilih dan memilah arus globalisasi akan terbawa arus negatif. Masnur Muslich (2004:1) berpendapat “bahwa hal itu terjadi karena globalisasi telah membawa kita pada perubahan materi sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan masyarakat”.

Era globalisasi memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan diri manusia. Ketidaktepatan masyarakat menyikapi perubahan sosial akibat dampak dari globalisasi dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menjadikan masyarakat melakukan penyimpangan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus kejahatan yang merupakan cermin krisis karakter bangsa merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Sampai pada saat ini sering kita lihat tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan kejahatan adalah masyarakat yang melanggar aturan dan hukum negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana, lama hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban nara pidana dan lain sebagainya.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Narapidana yang sudah divonis hukuman secara otomatis akan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem undang-undang tentang pemasyarakatan, narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan, hak dan kewajiban sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Provinsi Sumatera Utara memiliki lembaga pemasyarakatan dan Rutan/Cab. Rutan sebanyak 37 Unit, terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan dan 20 Rutan/Cab. Salah satu Lembaga pemasyarakatan yang besar di Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki luas 7.500 m² dengan kapasitas hunian 181 orang. Dan saat ini dihuni 235 orang Narapidana.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, bahwa keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sangat baik, terbukti Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai pembinaan terhadap Narapidana. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak diperbolehkan melakukan apapun. Seorang narapidana memiliki hak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan. Selama tinggal di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang dimaksud.

Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dengan memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menjadikan pembinaan bagi narapidana sebagai sarana untuk memberikan narapidana pendidikan karakter. Setiap narapidana memiliki karakter, kepribadian, watak dan minat serta bakat yang berbeda. Namun demikian, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak luput dari beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.”

METODE

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis pendekatan yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai peristiwa atau masalah yang akan diteliti.

Metode penelitian kualitatif menurut Saryono (2010): “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif”.

Alasan digunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hendak menggambarkan Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli secara nyata. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kondisi atau keadaan suatu objek. Dengan menggunakan pendekatan ini data dapat diperoleh lebih lengkap untuk tercapainya tujuan dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

2. Tahapan Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan. Adapun Implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan sebagai berikut:

1. Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Proses implementasi pendidikan karakter merupakan proses kebijakan yang penting. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak ada gunanya apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilakukan melalui 2 proses pembinaan pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosua Zebua, S.E (kepala seksi Binadik Dan Giatja) didapat data bahwa 2 proses pembinaan warga binaan, yaitu:

“Dari tahun ketahun lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli selalu memberikan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Proses pembinaan ini dilakukan dengan 2 proses, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini tertuju pada sifat dan perilaku warga binaan seperti karakter warga binaan, setiap saat kami pihak lapas selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. Biasa kita melakukan pendekatan secara perorangan agar mereka dapat berubah dan berada di jalan yang benar. Kemudian dalam proses pembinaan kemandirian ini, warga binaan dituntun untuk selalu mengerjakan kegiatan atau program apapun di lembaga pemasyarakatan, supaya mereka bisa mandiri dan selalu tidak bergantung pada sesama warga binaan. Kemudian mereka juga dilatih dan dituntun supaya selalu disiplin, baik itu disiplin waktu dan sebagainya.” (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan Bapak Yosua Zebua, S.E tentang pendidikan karakter yang dilakukan lembaga pemasyarakatan melalui proses pembinaan di dukung dengan pernyataan yang sama oleh Bapak Adi Gea, yaitu : “Memang betul yang disampaikan oleh Bapak Yosua Zebua, bahwa lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih menjalankan kebijakan atau kegiatan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan. Karena warga binaan yang masuk di lembaga pemasyarakatan ini memiliki kasus yang berbeda-beda, maka pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pendidikan karakter melalui 2 proses pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.”

(Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Dari pemaparan dua pendapat di atas memang benar adanya. Ini dapat dibuktikan pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Juli 2023 terdapat warga binaan yang sedang melakukan kegiatan seperti ibadah pagi, kegiatan kemandirian dan ada juga yang berolahraga. Tanggal 31 Juli 2023, peneliti mendapati petugas parkir Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah seorang Warga Binaan.

Pendidikan karakter melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan sarana untuk memperbaiki kepribadian Warga Binaan. Pendidikan karakter dibutuhkan di dalam hal ini. Pendidikan karakter di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dituangkan di dalam kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Yosua Zebua, S.E selaku Kepala seksi BINADIK dan GIATJA, yaitu : “Semua kegiatan disini wujud dari pembentukan karakter warga binaan. Dari pembinaan yang mereka dapat, kami pihak lapas selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. Biasa kita melakukan pendekatan secara perorangan agar mereka dapat berubah dan berada di jalan yang benar”. (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pendapat dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter diberikan kepada warga binaan melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan digunakan sebagai sarana memperbaiki kepribadian warga binaan dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri warga binaan.

Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan dituangkan di dalam beberapa program kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yosua Zebua, S.E (kepala seksi BINADIK dan GIATJA), yaitu : “Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan kami pihak lembaga pamasarakatan memberlakukan beberapa kegiatan, seperti ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui pendidikan rohani, pendidikan agama, dan langkah-langkah yang kami laksanakan ini selalu menjalin kerjasama dengan kementerian agama, lembaga-lembaga gereja. dan ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang ada, seperti tersedianya rumah ibadah dan juga rohaniawan dan penyuluh keagamaan juga ada. Kemudian kegiatan lain adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, kami selalu memberikan pemahaman itu kepada warga binaan melalui upacara-upacara penaikan bendera yang dilaksanakan setiap hari senin dan juga pelaksanaan apel pagi. Kemudian ada juga kegiatan perubahan sikap dan perilaku, yaaa...kita selalu memberikan itu dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan tentang psikolog dan di dukung juga oleh adanya perpustakaan, dan pendidikan keagamaan. Dan juga ada kegiatan mengasah keterampilan warga binaan seperti ada kegiatan kerajinan tangan dan keterampilan lain. Sehingga harapan kami semoga warga binaan ini ketika selesai menjalani masa tahanan dan bisa kembali ke tengah masyarakatan dapat diterima kembali dan juga mendapat perubahan sikap dan perilaku, serta mempunyai keterampilan tersendiri.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut diatas juga di sama persis yang disampaikan oleh Bapak Erwin Waruwu (warga binaan), yaitu : “Kami warga binaan yang ada disini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk kepribadian kami dan juga menyadari kesalahan yang telah menjerumuskan kami bisa masuk disini. Kami selalu melakukan kegiatan rohani, upacara, apel pagi dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pamasarakatan terhadap warga binaan dalam membentuk karakter dan kepribadian warga binaan, sehingga ketika warga binaan telah selesai menjalani masa tahanan maka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan memiliki perubahan kepribadian dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Kemudian Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli di bagi menjadi dua, yaitu pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan pembinaan dan pembimbingan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian di bagi menjadi tiga, yaitu pembinaan dan pembimbingan intelektual, jasmani dan rohani. Pembinaan dan pembimbingan kemandirian di bagi menjadi tiga, diantaranya adalah pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan

dan kegiatan kerja. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, petugas pemasyarakatan berusaha menumbuhkan nilai-nilai karakter yang berguna untuk narapidana.

2. Kendala Yang Dihadapi Petugas Pemasyarakatan Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota gunungsitoli.

“Kendala berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kendala dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami” (Badudun-Zain, 1994:489). Pada penelitian ini yang menjadi kendala dalam implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan adalah warga binaan itu sendiri dan sarana prasarana yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yosua Zebua, S.E (Kepala seksi BINADIK dan GIATJA) tentang kendala yang dialami oleh petugas pemasyarakatan, yaitu: “Yaaa... memang setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti ada hambatan ataupun kendala yang dialami, kegiatan apapun itu pasti ada. Nah, di lembaga pemasyarakatan ini petugasnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui pembinaan dan pembimbingan mengalami kendala di lapangan, misalnya, karakter warga binaan. Mulai sebelum masuk di lembaga pemasyarakatan, warga binaan ini mempunyai karakter yang bisa dikatakan buruk, jadi susah untuk diarahkan. Walaupun dilakukan pembinaan dan pendekatan sewaktu-waktu akan kembali lagi pada karakter tersebut. sehingga mau tidak mau petugas pemasyarakatan tegas dalam hal melakukan pembinaan.

Kemudian kita juga disini tidak ada petugas yang mempunyai basic untuk pendidikan karakter bagi warga binaan, yaa setidaknya kan petugas yang pendidikannya mempunyai keahlian dalam psikolog, karena masyarakat yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan ini berasal dari berbagai macam kasus tindak pidana, yaaa muda-mudah kedepan ada petugas yang ahli dalam hal tersebut. Kemudian kendala lain adalah ketidaktersediaan ruangan yang khusus untuk pembinaan karakter warga binaan seperti ruangan konseling, apalagi sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.” (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan diatas juga di dukung oleh Bapak Adi Gea (petugas pemasyarakatan), yaitu : “Saya sebagai petugas pemasyarakatan yang setiap saat melaksanakan tugas sebagai pendidik warga binaan tentunya banyak dan bermacam-macam kendala yang saya hadapi, misalnya ketika ada warga binaan yang karakternya memang sudah buruk dari lingkungan masyarakat dia berada dan terbawa-bawa di lembaga pemasyarakatan. Saya sebagai petugas selalu mengarahkan dan memberikan pembinaan sesuai dengan program atau kegiatan dan bahkan melakukan pendekatan secara perorangan, tetapi sewaktu-waktu akan berubah lagi dan kembali lagi ke karakter awalnya. Kemudian kendala lain adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lengkap yang memang bisa digunakan oleh petugas dan bahkan warga binaan ketika melakukan aktivitas atau kegiatan dalam pendidikan karakter ini. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembinaan dan pembinaan ini bukan hanya petugas pemasyarakatan yang mengalami hambatan ataupun kendala. Ada juga warga binaan yang memang mengakui ada kendala yang dialaminya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang searah dalam pendidikan karakter ini.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Erwin Waruwu (warga binaan), yaitu : “saya akui memang pendidikan karakter yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada kami warga binaan sudah cukup baik, tetapi dibalik itu ada juga kelemahan yang dialami oleh petugas maupun warga binaan. Kadang saya malas dalam mengikuti kegiatan tersebut karena karena sarana dan prasarana yang kami gunakan kurang mendukung, kemudian kegiatan pendidikan karakter kurang stabil karena tidak ada tempat khusus untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan yang memiliki karakter yang bisa dikatakan buruk”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dari implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah karakter warga binaan dan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Pihak lapas harus dapat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Padahal, kegiatan yang diselenggarakan pihak lapas bervariasi dan banyak. Dengan adanya banyak kegiatan tentu membutuhkan peralatan yang banyak pula. Namun pada kenyataannya, di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat kendala berupa kurangnya

peralatan untuk melakukan kerja. Sehingga kegiatan yang dilakukan kurang stabil atau kurang berjalan dengan baik.

3. Upaya Yang Dilakukan Petugas Pemasarakatan Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Dengan berbagai macam kendala yang dialami, solusi dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang ada. Sebelumnya terdapat beberapa pemaparan mengenai kendala yang ada, selanjutnya ada beberapa solusi yang dipaparkan oleh Bapak Yosua Zebua, yaitu: "Tentu untuk melaksanakan kegiatan ini walaupun tadi berbagai kendalanya tentu ada juga upaya-upaya kami sebagai petugas pemasarakatan. Warga binaan yang memiliki karakter yang susah untuk diarahakan tentunya kami melaksanakan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan. Yaaa... sehingga pendekatan secara persuasif ini atau komunikasi secara pribadi ini lebih kami tekankan kepada warga binaan sehingga mereka juga dapat menceritakan atau curhat dengan kami tentang apa yang dirasakan atau dialaminya, beban psikologi yang mereka hadapi dapat disampaikan kepada kami sehingga kami juga tahu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian tentang petugas pemasarakatan yang ahli dalam psikolog atau yang bisa mengetahui tentang karakter. Yaaaa... kami selalu menunggu semoga kedepan ini atau tahun ini ada petugas yang ditempatkan disini yang latar belakangnya memang ahli dalam psikolog. Kemudian untuk sarana dan prasarana, memang kami selalu mengajukan permohonan proposal kepada atasan untuk memberikan solusi yang baik dengan melengkapi sarana dan prasarana atau alat-alat yang digunakan oleh petugas dan warga binaan dalam melakukan kegiatan pembinaan ini, sehingga tidak ada lagi kendala. Jadi semoga tahun ini dapat dipenuhi dan diatasi apa saja yang menjadi hambatan tersebut." (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut juga di atas di dukung penuh oleh Bapak Adi Gea (Petugas Pemasarakatan), yaitu : "Agar berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, petugas lapas akan memberikan Reward kepada para narapidana yang menaati segala bentuk aturan yang berlaku. Adapun bentuk dari Reward itu sendiri adalah cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Sedangkan untuk narapidana yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Adapun sanksi tersebut adalah tidak diusulkan memperoleh remisi, cuti dan bebas. Kemudian kami memberikan motivasi-motivasi yang dapat membangun hati nurani mereka dan memberikan pandangan yang baik kepada mereka, menjelaskan apa saja keuntungan yang akan di dapat dari menjalankan pembinaan ini. Kemudian melakukan pengajuan proposal untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang guna menambah peralatan yang kurang guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Memberikan motivasi melalui pendekatan individu kepada para narapidana". (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan atau komunikasi secara perorangan agar apa yang dialami oleh warga binaan dapat diberikan solusi oleh petugas pemasarakatan. Kemudian pemberian hadiah berupa reward yang berwujud cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga. Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat dijadikan jembatan untuk bisa mendapatkan remisi maupun pembebasan. Dengan mensosialisasikan keuntungan narapidana melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan maka narapidana akan tergugah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat proposal pengajuan penambahan barang ataupun sarana prasarana yang masih kurang.

Pembahasan

Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli

Suatu kebijakan dirumuskan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada warga binaan adalah untuk mengembalikan warga binaan ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli juga bertujuan menjadikan warga binaan sebagai

warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli didalamnya diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para warga binaan. Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dapat mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan tersebut.

Pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan dari pendidikan ini adalah mengembalikan warga binaan ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan penanaman kepribadian maupun karakter yang baik. Pembinaan ini bersifat wajib bagi warga binaan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, warga binaan dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Pendidikan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan warga binaan, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk warga binaan. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Karakter Bagi warga Binaan

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan dapat dikatakan berhasil apabila dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Dampak yang di peroleh warga binaan dari melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak lepas dari adanya faktor pendukung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada tiga faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi warga binaan. Faktor pertama adalah kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi warga binaan. Warga binaan yang telah ditetapkan sebagai warga binaan maka berkewajiban menjalankan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan yang bersifat wajib maka warga binaan terbiasa menjalankan kebijakan tersebut.

Faktor yang kedua adalah warga binaan yang tertib dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan akan diusulkan memperoleh cuti, baik cuti menjelang bebas, cuti hari raya, cuti bersyarat hingga perolehan remisi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap mapenaling (orientasi) pihak petugas pemasyarakatan memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang disosialisasikan adalah keuntungan yang di dapat warga binaan apabila melaksanakan segala tata tertib dan ketentuan selama di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan yang rutin menjalankan pembinaan dan pembimbingan serta menaati tata tertib yang ada, akan diusulkan untuk memperoleh cuti dan remisi. Dengan melaksanakan kebijakan tersebut, warga binaan memiliki berbagai keuntungan seperti memiliki keterampilan baru, memperoleh pengalaman bekerja, mengisi waktu luang warga binaan, meningkatkan kemandirian warga binaan, menyalurkan bakat dan minat warga binaan dan tentu keuntungan memperoleh remisi dan cuti.

Faktor yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan LKBH dan dinas pendidikan dan kementerian agama atau gereja. Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Agus Wibowo (2012:45) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui proses sosialisasi/penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia kerja dan dunia industri.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan tidak lepas dari adanya permasalahan maupun hambatan-hambatan. Faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan menyebabkan terhambatnya tujuan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah kurangnya

motivasi warga binaan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah masih ada warga binaan yang kurang motivasi dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Narapidana yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya maka tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak dapat diperoleh warga binaan. Selain minimnya motivasi, faktor sarana prasarana yang terbatas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Mulyasa (2013:24) berpendapat bahwa pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara dan memperkaya khazanah belajar, sumber-sumber belajar juga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas belajar. Dengan demikian sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak seimbangnya antara warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian kerja dengan peralatan maupun prasarana yang ada dan begitu juga dengan ruangan atau bangunan yang terkhusus untuk membina karakter warga binaan.

Solusi dari Hambatan Implementasi Pendidikan Karakter

Setelah adanya faktor penghambat, tentu dibutuhkan solusi dari setiap faktor penghambat. Dalam hal ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli telah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas. Solusi yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan penghargaan kepada warga binaan yang menaati segala tata tertib dan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Penghargaan yang diberikan kepada warga binaan berupa pengajuan cuti bersyarat, pengajuan remisi, pengajuan bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi warga binaan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan.

Dengan memberikan penghargaan, warga binaan akan bertindak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dijadikan warga binaan sebagai penyemangat dalam bekerja di lembaga pemasyarakatan. Namun tentunya penghargaan tersebut harus benar-benar dikaji dan dipertimbangkan ketika akan diberikan kepada warga binaan. Penghargaan harus diberikan kepada warga binaan yang benar-benar sepatasnya memperoleh penghargaan tersebut.

Selain pemberian penghargaan, petugas pemasyarakatan juga memberikan sanksi hukuman kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan narapidana adalah tidak memberikan izin cuti, atau kunjungan keluarga kepada warga binaan. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga melakukan pendekatan individu untuk meningkatkan motivasi warga binaan. Pasalnya, masyarakat yang pernah berstatus warga binaan tentu akan kehilangan kepercayaan diri warga binaan ketika masuk ke dalam lingkungan masyarakat kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2013:64-65) yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip peserta didik akan bekerja keras apabila ia memiliki minat dan perhatian terhadap suatu pekerjaan, memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan tepat guna.

Solusi yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang. Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan karena tanpa sarana dan prasarana, kegiatan yang ada tidak dapat berjalan dan tujuan dari pemasyarakatan sendiri tidak dapat tercapai. Dengan adanya kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli saat ini, maka sangat penting untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung. Mengingat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang banyak.

SIMPULAN

1. Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan

- Kelas II B Kota Gunungsitoli sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan dari pendidikan ini adalah mengembalikan warga binaan ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan penanaman kepribadian maupun karakter yang baik. pembinaan ini bersifat wajib bagi warga binaan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas masyarakatan, warga binaan dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Pendidikan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a) warga binaan yang taat dan tertib; b) adanya pihak ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil produksi warga binaan dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajian bagi muslim dan ibadah kristen rutin warga binaan; c) d) sifat kebijakan yang wajib diikuti oleh warga binaan. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a) motivasi warga binaan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter adalah: a) memberikan kepada para warga binaan berupa pengusulan cuti mengunjungi keluarga serta segala bentuk cuti lainnya. Selain pemberian cuti, warga binaan yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa perolehan hukuman selama enam hari kerja yaitu dimasukkan ke dalam Selker; b) memberikan motivasi kepada warga binaan, dan c) mengajukan proposal untuk penambahan sarana prasarana yang kurang ke Kantor Wilayah Hukum Hak Asasi Manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Wibowo. (2012). *Pembinaan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Akhmad Muhaimin Azzet. (2011). *Urgensi Pembinaan Karakter di Indonesia: Revitalisasi pembinaan karakter terhadap keberhasilan belajar dan kemajuan bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dwidja Priyatno. (2006): *Sistem Pembinaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Masnur Muslich. (2014). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multi-dimensional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muchlas Samani dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah Thoha. (2008). *Manajemen Pembinaan dan Pengampliasian*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Pembimbingan*. Diakses dari
- Fadjri Prathama. (2015). *Pelaksanaan Tindakan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Melanggar Peraturan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Masyarakat Kelas II A Padang*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Diakses melalui www.journal.unitas-pdg.ac.id
- Fitriyani Rohmawati. (2015). *Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Masyarakatan di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekalongan*. Diakses dari <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/771>